



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Analisis Capaian Kinerja Di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

A Lestari^{a,*}, F Murdapa^b, A Setiawan^c

^{a,b,c}Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, JL. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021

Direvisi 18 November 2021

Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Capaian Kinerja

Rencana Strategis

Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka perwujudan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Provinsi Lampung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi ke 4 Gubernur Lampung yaitu Mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung agar terwujudnya dalam tingkat keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pendahuluan

Dalam rangka perwujudan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Provinsi Lampung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi ke 4 Gubernur Lampung yaitu Mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya

sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan pola pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yaitu terjadinya perubahan perencanaan anggaran dari tradisional budget menjadi performance budget lebih berorientasi kepada kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kebijaksanaan pengalokasian anggaran juga mempedomani hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, dan rencana kerja satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang dicerminkan dalam arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan diterapkannya

*Penulis korespondensi.

E-mail: xxx@... (P Pertama).

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan

anggaran kinerja di dalam penyusunan APBD sekarang ini, belanja aparatur dan belanja pelayanan publik dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh di dalam sistem penganggaran untuk mendapatkan standar analisa belanja yang lebih rasional pada setiap unit cost yang dianggarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung agar terwujudnya dalam tingkat keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan misi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Capaian Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) menurut Mahsun (2013:25), adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/progam/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Sulistiyani (2003 : 223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Dalam buku yang sama menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003 : 223 - 224) menyatakan, bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas berkaitan dengan kinerja, peneliti menyimpulkan. Kinerja adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi yang menghasilkan hal-hal positif dan hasil tersebut berdampak pada kelompok sasaran. Setiap orang dalam organisasi adalah bagian dari kinerja yang berhubungan melalui sistem yang dibuat oleh organisasi tersebut. Setiap sistem seperti pelatihan dan imbalan berintegrasi dengan tujuan dalam mencapai efektivitas organisasi yang berkelanjutan.

2) Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut pendapat Mahsun (2013 : 26), elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 2) Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi- indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. 3) Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi Mengukur

tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai sasaran atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 4) Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback*, *reward* dan *punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.2 Tinjauan Tinjauan Umum Mengenai Rencana Strategi (RENSTRA)

1) Landasan Formal Renstra

Sebagai salah satu dokumen rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, maka Rencana Strategi disusun selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas desentralisasi. Susunan Pemerintah Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. Adanya pemisahan DPRD dari unsur Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Oleh karena itu Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Disamping itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

Dengan demikian kedudukan rencana strategi selain sebagai salah satu dokumen rencana pembangunan kota, guna memenuhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 juga merupakan broad guide line (garis penuntun umum) penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus menjadi pedoman pokok penyusunan rencana strategi masing-masing perangkat daerah sesuatu dengan inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Kedudukan RENSTRA

Meneg-Otda dan PAU Studi Ekonomi UGM (2000 – 10) memberikan suatu batasan terhadap kedudukan dari Renstra, yaitu posisi perencanaan strategi lebih merupakan perencanaan jangka pendek ke menengah, dan bukan perencanaan jangka panjang. Perencanaan strategi dapat dipandang sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara rencana tahunan dan rencana jangka panjang tradisional (Donnelly : 1984).

Selanjutnya berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN dan BPKP, 2000 : 3) yang secara jelas menyebutkan bahwa : Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.3 Indikator Kinerja Utama

1) Pengertian Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

2) Tujuan dan Jenis –Jenis Indikator Kinerja Utama.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:

- a. Indikator *Input*: gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan *outcome* (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
- b. Indikator *Process*: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
- c. Indikator *Output*: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
- d. Indikator *Outcome*: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)
- e. Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator *outcome* pada tingkat yang lebih tinggi hingga *ultimate*.

3. Metodologi Penelitian

Prosiding SNIP Vol 1 No.1 ©2021 Program Studi Program Profesi Insinyur - Universitas Lampung.

3.1 Lokasi dan Sampel Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini adalah Ekspose Capaian Kinerja Dalam Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

3.2 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data informan atau narasumber yang telah ditentukan. Dan juga jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis yakni penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku. Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah bersifat deskriptif, yaitu para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data (Despa, 2021) yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuisisioner (Nama, 2018).
- 2) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martinus, 2020). Metode dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Keterkaitan Kebijakan Rencana Strategi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas selanjutnya disusun dan ditetapkan kebijakan strategi sebagai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada upaya pencapaian sasaran tersebut. Penetapan kebijakan tersebut diperlukan untuk mensinergiskan dan membangun keterpaduan langkah dan gerak pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, kegiatan-kegiatan, pengaturan tahap-tahap pencapaian tujuan berdasarkan prioritas, waktu dan pertimbangan serta sebab-akibat antara program-kegiatan yang saling berkaitan. Kebijakan strategi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan Visi-Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :



MATRIK KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

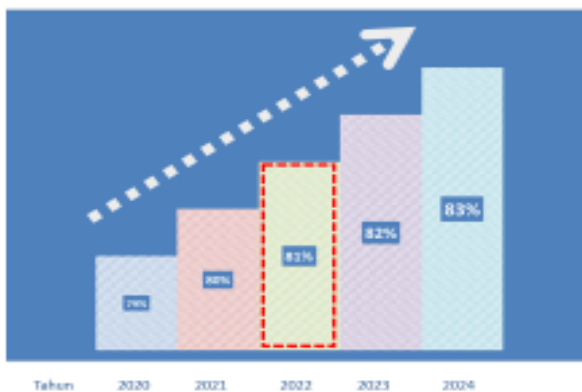
RPJMD	RENSTRA PD				
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
MISI : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persentase Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	83%	Program Penyelenggaraan Jalan
SASARAN MISI : Meningkatkan konektivitas antar wilayah					Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan mengacu pada Visi Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang selanjutnya diuraikan lagi menjadi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator / IKU*).

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TARGET JALAN MANTAP 5 TAHUN KE DEPAN (RPJMD)

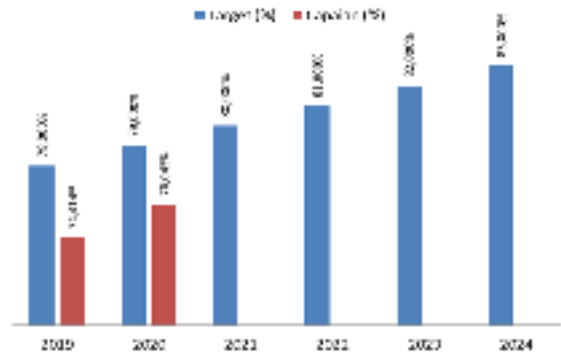


Berdasarkan tabel diatas, Target Kinerja Kemantapan Jalan pada Rencana Strategi (RENSTRA) Dina Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung 2019 – 2024 dimulai angka 78% pada adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 300.000.000.000.,

pada tahun 2019, maka target kemantapan jalan sebesar 78% pada akhir tahun 2019 belum dapat tercapai .

Hasil survey kondisi jalan pada akhir tahun 2020 tingkat kemantapan jalan hanya mencapai angka 76,045%. Tingkat kemantapan jalan 2020 masih dibawah target sebesar 79%.

Evaluasi Pencapaian IKU



Berdasarkan Grafik diatas, terlihat data capaian IKU pada tahun 2019 dan 2020 selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan.

4.3 Kendala Dan Tantangan Penyebab Kinerja Capaian Berada Di Bawah Target

1. **Kendala**
 - a) **Kendala Anggaran (*Budget Constraint*)**, ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - b) Adanya rasionalisasi (efisiensi) anggaran APBD Pemerintah Provinsi Lampung.
2. **Tantangan**
 - a) Tingginya angka degradasi jalan. Kondisi topografi alam yang sebagian besar badan jalan terletak berdampingan dengan sungai dan rawa yang terkadang mengakibatkan terendahnya sebagian badan jalan.
 - b) Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas seiring meningkatnya kondisi jalan mengakibatkan bertambahnya pelanggaran muatan melebihi tonase yang melampaui kekuatan struktur jalan.
 - c) Semakin banyaknya pemanfaatan rumija yang tidak sesuai peruntukannya oleh masyarakat.
 - d) Kurangnya kerjasama dari masyarakat setempat terkait pembangunan.
 - e) Belum sinergisnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan antara kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
 - f) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan jalan

5. KESIMPULAN

Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas selanjutnya disusun dan ditetapkan kebijakan strategi sebagai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada upaya pencapaian sasaran tersebut. Penetapan kebijakan tersebut diperlukan untuk mensinergiskan dan membangun keterpaduan langkah dan gerak pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi

Lampung, kegiatan-kegiatan, pengaturan tahap-tahap pencapaian tujuan berdasarkan prioritas, waktu dan pertimbangan serta sebab-akibat antara program-kegiatan yang saling berkaitan.

Dengan mengacu pada Visi Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang selanjutnya diuraikan lagi menjadi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator / IKU*).

Kendala Dan Tantangan Penyebab Kinerja Capaian Berada Di Bawah Target :

- a. Kendala : Kendala Anggaran (*Budget Constraint*), ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Adanya rasionalisasi (efisiensi) anggaran APBD Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Tantangan : Tingginya angka degradasi jalan. Kondisi topografi alam yang sebagian besar badan jalan terletak berdampingan dengan sungai dan rawa yang terkadang mengakibatkan terendahnya sebagian badan jalan, Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas seiring meningkatnya kondisi jalan mengakibatkan bertambahnya pelanggaran muatan melebihi tonase yang melampaui kekuatan struktur jalan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Program Studi – Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Lampung atas dukungannya dalam penulisan dan presentasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besaran Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Nama, G. F., & Muludi, K. (2018). Implementation of two-factor authentication (2FA) to enhance the security of academic information system. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(8), 2209-2220.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang Perumahan Dan Permukiman. 2018. *“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2018”*. Sumbawa Barat.
- Ramlan. 2011. *“Model Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) (Studi Pada Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun 2006-2010)”*. Medan : R a m l a n Vol .2, No.1, Desember 2011.
- Pemerintah Kota Malang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. 2018. *“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”*. Malang.
- Pemerintah Kabupaten Bantul Sekretariat Daerah Bantul. 2019. *“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*. Bantul

Pemerintah Kota Bandung Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. 2015. *“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”*. Bandung : LKIP 2015